

ABSTRAK

Kedudukan buruh (tenaga kerja) sangat lemah dibandingkan kedudukan pemilik pekerjaan dalam prakteknya. Sejumlah hak buruh (tenaga kerja) telah diatur dalam pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada kalanya, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*) karena tidak ada ancaman sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing* tersebut. Masalah pokok penelitian ini adalah: (1) Apakah pekerja *outsourcing* berhak mendapat perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari perusahaan? (2) Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi pekerja *outsourcing* dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yakni dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis-formal. Selanjutnya, menghubungkannya dengan penerapan dalam praktik dunia hukum ketenagakerjaan khususnya masalah *outsourcing*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan:

1. Pekerja *outsourcing* memiliki hak-hak atas Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Namun, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan penyedia tenaga kerja (perusahaan *outsourcing*) karena tidak ada ancaman sanksi atau ancaman hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja *outsourcing*.
2. Upaya hukum untuk melindungi pekerja *outsourcing* dapat dilakukan secara preventif maupun secara represif. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan dan melalui (di dalam) pengadilan. *Pertama*, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan misalnya dengan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi. *Kedua*, penyelesaian perselisihan melalui (di dalam) pengadilan misalnya dilakukan melalui upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Kata Kunci: hak pekerja, outsourcing, upaya hukum